

Kaofe Cup I Bergulir di Kadatua, Bupati Buton Selatan Adios Dorong Lahirnya Atlet Futsal Muda

berkembang di Indone-

sia. Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Adios mengapresiasi panitia dan masyarakat Desa Kaofe yang dinilai berhasil mengadirkan turnamen berskala terbuka sebagai sarana pembinaan olahraga daerah. “Melalui turnamen ini, saya berharap akan lahir atlet-atlet muda berbakat yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Buton Selatan di tingkat yang lebih tinggi,” ujar Adios.

Menurut dia, olahraga tidak hanya berfungsi sebagai ajang kompetisi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun karakter generasi muda. “Junjung tinggi sportivitas dan fair play. Jadikan ajang ini sebagai momentum mem-

perkuat persatuan serta semangat membangun daerah,” katanya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan Ketua PSSI Buton Selatan, kemudian dilanjutkan sambutan Sekretaris KONI Buton Selatan yang mewakili Ketua KONI. Setelah prosesi pembukaan resmi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama para pemain, panitia, serta seluruh tamu undangan yang hadir.

Sejumlah pejabat turut menghadiri acara tersebut, antara lain Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Ketua TP-PKK Kabupaten Buton Selatan Ny. Hj. Siti Norma Adios, Ketua PSSI Buton Selatan,

Sekretaris KONI Buton Selatan, para asisten Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, para kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, serta Camat Kadatua.

“Olahraga merupakan media yang efektif untuk mempererat persaudaraan dan menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat,” kata Adios. Ia menilai kompetisi yang sehat dapat menjadi sarana membangun karakter disiplin, kerja sama, dan mental juara bagi generasi muda.

Secara historis, futsal berkembang pesat sejak diperkenalkan pertama kali di Uruguay pada 1930 oleh Juan Carlos Ceriani. Di Indonesia, olahraga ini mulai mengalami pertumbuhan signifikan

pada awal 2000-an dan kini menjadi salah satu cabang olahraga paling populer di kalangan generasi muda. Pemerintah pusat melalui berbagai program pembinaan olahraga juga terus mendorong peningkatan prestasi atlet daerah sebagai fondasi penguatan olahraga nasional.

Bagi Buton Selatan, penyelenggaraan Kaofe Cup I menjadi momentum penting dalam memperluas pembinaan olahraga hingga ke tingkat desa dan kecamatan. Pemerintah daerah berharap turnamen tersebut dapat melahirkan bibit-bibit atlet potensial yang kelak mampu bersaing di level regional, nasional, bahkan internasional serta membawa nama daerah ke pentas yang lebih tinggi. (*)

Pemprov Sultra Prioritaskan Perbaikan Jalan Pongkowulu dan Lambale-Ereke

jalan.

Sementara itu, pen-
anggaran ruas jalan Pongkowulu dilaku-
kan melalui dua ske-
ma pembiayaan, yakni menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pen-
anggaran darurat serta melalui usulan pro-
gram Inpres Jalan Daerah (IJD). Prioritas awal difokuskan pada tanjakan Pongkowulu sepanjang 150 meter yang mengalami keru-
sakan berat dan dinilai membahayakan peng-
guna jalan.

“Pengerjaan ruas jalan Pongkowulu di-
prioritaskan pada tan-
jakan sepanjang 150
meter yang kerusakannya sangat parah dan membahayakan pen-
gendara,” ujar Andi.
“Pada bulan Juni ini juga perbaikan akan dilakukan menggu-
nakan anggaran pe-
meliharaan rutin pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.”

Setelah penanganan darurat selesai, pemer-
intah provinsi akan melanjutkan pening-
katan ruas Pongkowulu sepanjang lima kilometer melalui skema IJD. Saat ini, tim teknis masih meny-
usun dokumen usulan serta melengkapi

berbagai persyaratan yang dibutuhkan agar proyek dapat memperoleh dukungan pen-
danaan pusat.

Secara historis, pembangunan infras-
truktur jalan menjadi salah satu faktor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Di Indone-
sia, pembangunan jaringan jalan nasion-
al sejak era Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada
dekade 1970-an ter-
bukti mampu memper-
cepat distribusi barang dan jasa antardaerah. Secara global, laporan Bank Dunia menun-
jukkan bahwa pening-
katan kualitas infra-
struktur transportasi berkontribusi terhadap penurunan biaya lo-
gistik dan peningkatan daya saing wilayah, terutama di kawasan kepulauan dan daerah terpencil.

Dengan berlanjutnya pembangunan ruas Lambale-
“Ereke dan Pongkowulu, Pemprov Sultra berharap konek-
tivitas antarwilayah di Buton Utara semakin baik, akses masyarakat terhadap layanan pub-
lik meningkat, serta aktivitas ekonomi lo-
kal dapat tumbuh lebih cepat melalui dukun-
gan infrastruktur yang memadai. (*)

Hj. Siti Norma Adios Kukuhkan 36 Pengurus BKMT Lapandewa, Siap Perkuat Pembinaan Umat dan Jadi Mitra Strategis Pemerintah

tahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan, Kaimuddin, S.Ag., S.H., M.H., yang mewakili Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A. Hadir pula Kepala Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan, para kepala organisasi perangkat daerah, unsur Forkopimca, Danramil 1413-09 Sampolawa, Kapolsek Lapandewa, camat, kepala bagian lingkup Setda, serta jajaran pengurus BKMT tingkat kabupaten.

Dalam sambutannya, Hj. Siti Norma Adios menegaskan bahwa pengukuhan tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan bagian dari upaya memperkuat peran majelis taklim sebagai sarana pembinaan umat di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks.

“Pelantikan dan pengukuhan ini bukan hanya kegiatan seremo-

nial, tetapi momentum untuk memperkuat peran majelis taklim dalam meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak, dan kehidupan sosial masyarakat,” ujar Siti Norma.

Menurut dia, BKMT memiliki posisi penting dalam membangun karakter masyarakat karena tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu agama, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pembinaan moral, penguatan akhlak, serta penanaman nilai kebersamaan. Karena itu, pengurus yang baru dikukuhkan diharapkan mampu menghadirkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan yang berkesinambungan, mulai dari pengajian rutin, pembinaan akhlak remaja, pendidikan Al-Qur'an, santunan bagi kaum dhuafa, hingga pemberdayaan

perempuan. “BKMT harus mampu menjadi mitra pemerintah dalam menjaga ketahanan sosial dan spiritual masyarakat,” katanya.

Siti Norma juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas organisasi dan membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur lainnya. “Sinergi dan kerja sama yang kuat menjadi kunci agar program-program BKMT dapat berjalan maksimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Secara historis, BKMT merupakan organisasi kemasyarakatan Islam yang berdiri secara nasional sejak 1981 dan berkembang menjadi salah satu jaringan majelis taklim terbesar di Indonesia. Organisasi ini memiliki peran penting dalam pendidikan keagamaan

nonformal, pemberdayaan perempuan, serta penguatan ketahanan keluarga. Dalam konteks global, peran komunitas keagamaan berbasis masyarakat juga menjadi perhatian berbagai lembaga internasional karena dinilai efektif memperkuat kohesi sosial dan mendorong pembangunan berbasis nilai di tingkat akar rumput.

Di akhir kegiatan, Ketua BKMT Kabupaten Buton Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya pengukuhan tersebut. Ia berharap BKMT Kecamatan Lapandewa dapat menjadi pelopor dalam mewujudkan masyarakat yang religius, harmonis, dan berakhlakul karimah. “Semoga segala jerih payah dan pengabdian kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala,” tuturnya. (*)

Bupati Buton Alvin Pastikan Penanganan Pasar Kaloko Sesuai Kemampuan Daerah, Pedagang dan Pemkab Buton Sepakat Dianggarkan pada APBD Perubahan 2026

pasar, termasuk kios baru, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.

Saat meninjau lokasi, Bupati Alvin mendapati adanya pemblokiran jalan di kawasan pasar yang dilakukan pedagang sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Namun, situasi tersebut dapat diselesaikan melalui dialog terbuka antara pemerintah dan para pedagang.

“Kami datang untuk mendengar langsung keluhan pedagang dan mencari solusi bersama. Kondisi keuangan daerah saat ini memang sedang terbatas, namun pemerintah tetap berkomitmen mencari jalan keluar yang terbaik,” kata Alvin di hadapan para pedagang.

Menurut dia, kebutuhan yang disampaikan pedagang tidak dapat ditangani secara instan karena harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Oleh kare-

na itu, pemerintah memilih memasukkan kebutuhan tersebut dalam skema APBD Perubahan agar memiliki dasar pembiayaan yang jelas dan terukur. Penjelasan tersebut mendapat respons positif dari para pedagang. Setelah melalui pembahasan bersama, mereka menyatakan memahami kondisi keuangan daerah dan menyetujui langkah pemerintah untuk mengupayakan penyelesaian melalui perubahan anggaran tahun berjalan.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Buton, Sadiu, mengapresiasi sikap para pedagang yang mengedepankan dialog. “Pemerintah daerah tidak tinggal diam dan terus mengusahakan penambahan kios Pasar Kaloko melalui APBD Perubahan. Ini merupakan komitmen Bupati Buton karena Pasar Kaloko menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi mas-

yarakat,”ujarnya.

Secara historis, pasar rakyat memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan pasar tradisional masih menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Sementara itu, pengalaman sejumlah negara di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan memperlihatkan bahwa revitalisasi pasar rakyat menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga perputaran ekonomi lokal sekaligus memperkuat sektor usaha mikro dan kecil.

Sadiu menegaskan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan menyiapkan kebutuhan teknis agar rencana penambahan kios dapat segera direalisasikan setelah dukungan anggaran tersedia. “Kami mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan terus mengedepankan komunikasi yang baik agar seluruh proses dapat berjalan sesuai harapan bersama,” katanya. (*)

Bupati Azhari Libatkan Imam Masjid Wujudkan Buton Tengah sebagai Kota Santri

agama dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah.

“Imam masjid menjadi mitra strategis pemerintah dalam membina kehidupan keagamaan dan membentuk karakter masyarakat yang religius,” kata Azhari di hadapan para peserta yang terdiri atas imam masjid dari berbagai kecamatan di Buton Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Azhari juga menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan insentif imam masjid yang saat ini

berkisar antara Rp400 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, peningkatan kesejahteraan imam tetap menjadi perhatian utama.

“Insentif imam masjid menjadi perhatian pemerintah daerah. Pada anggaran perubahan nanti, kita usahakan ada penambahan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka,” ujarnya.

Lebih jauh, Azhari menjelaskan bahwa visi Kota Santri dan Kota

Pendidikan tidak lahir sebagai gagasan baru yang meniru daerah lain. Visi tersebut, kata dia, berangkat dari sejarah panjang Buton sebagai salah satu pusat penyebaran Islam dan pengembangan pendidikan di kawasan timur Nusantara sejak masa Kesultanan Buton.

“Kita tidak meniru daerah lain. Kita ingin mengembalikan jati diri Buton yang sejak dahulu memiliki tradisi pendidikan dan keagamaan yang kuat,” tegasnya.

Secara historis, Kesultanan Buton yang berdiri sejak abad ke-16

dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam

Pertemuan yang turut dihadiri Wakil Bupati Muh. Adam Basan, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Abdulah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Tengah Abdul Rahman Jaya, serta pimpinan organisasi perangkat daerah tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah dan tokoh agama dalam mewujudkan Buton Tengah sebagai Kota Santri dan Kota Pendidikan yang berkelanjutan. (*)

Hari Lingkungan Hidup, Mahasiswa PTKIN Desak Penghentian Eksploitasi Lingkungan di Papua



Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri se-Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang kompleks parlemen, Jumat (5/6).

Laporan: Alwan

J A K A R T A , BP-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (5/6), bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak pemerintah menghentikan praktik eksploitasi lingkungan yang dinilai merugikan masyarakat Papua dan mengancam keberlanjutan ekosistem.

Aksi berlangsung dengan pengawasan ketat aparat kepolisian. Massa menggelar doa bersama, menyampaikan orasi, membentangkan spanduk, serta melakukan aksi simbolik berupa pembakaran ban sebagai bentuk protes terhadap berbagai persoalan lingkungan dan sosial yang mereka nilai belum mendapat perhatian serius dari negara.

Selain menyoroti isu lingkungan di Papua, mahasiswa juga mengangkat dugaan teror terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Mereka menilai ruang demokrasi harus di-

jaga dan kritik masyarakat tidak boleh direspons dengan intimidasi maupun tindakan yang mengancam kebebasan sipil.

“Hari ini juga kita banyak merasa risih dengan kondisi negara kita. Harusnya mereka mengambil dua fungsi, pertama fungsi otak dan hati,” ujar salah seorang orator dalam aksi tersebut.

Menurut mahasiswa, berbagai kebijakan pembangunan harus berpijak pada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Mereka menilai eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali berpotensi memperburuk kondisi sosial ekonomi warga yang tinggal di sekitar wilayah terdampak.

Seorang orator juga menggambarkan kesulitan yang masih dihadapi sebagian masyarakat di tengah melimpahnya kekayaan sumber daya alam. “Seorang ibu yang tak bisa membelikan susu untuk anaknya, betul? Tapi mereka yang punya posisi strategis di negeri ini mengambil kebijakan yang tidak berorientasi pada perubahan yang lebih baik,” katanya.

Dalam aksi itu, mahasiswa membentangkan baliho bertuliskan, “Setop

eksploitasi. Lingkungan bukan korban pembangunan.” Pesan tersebut menjadi simbol penolakan terhadap praktik pembangunan yang dianggap mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Isu yang mereka angkat sejalan dengan perhatian global terhadap perlindungan lingkungan hidup. Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 1972 melalui Konferensi Stockholm tentang Lingkungan Manusia. Peringatan tersebut menjadi momentum internasional untuk meningkatkan kesadaran terhadap ancaman kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.

Di tingkat nasional, isu eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan telah menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, berbagai organisasi masyarakat sipil masih kerap menyoroti tantangan implementasi kebijakan tersebut di se-

jumlah daerah yang kaya sumber daya alam.

Papua sendiri dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian berbagai kalangan terkait aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, mulai dari sektor pertambangan hingga perkebunan.

Sejumlah lembaga lingkungan dan akademisi terus mendorong agar pembangunan ekonomi di wilayah tersebut dilakukan secara berkelanjutan dengan mengedepankan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan kelestarian ekosistem.

“Kami meminta para pemegang kebijakan menggunakan akal sehat dan nurani dalam setiap keputusan yang diambil,” kata orator lainnya di hadapan peserta aksi.

Melalui demonstrasi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat komitmen terhadap pembangunan yang berkeadilan, menjaga kelestarian lingkungan, serta menjamin ruang demokrasi yang sehat bagi masyarakat sipil dan para pegiat hak asasi manusia.(*)

DPR Kaji Larangan Polisi Berafiliasi Ormas dalam Revisi UU Polri



Ilustrasi. Sejumlah anggota Polri mengikuti apel di Jakarta beberapa waktu lalu.

Laporan: Alwan

JAKARTA BP-Komisi III DPR RI membuka peluang memasukkan aturan yang lebih tegas mengenai larangan anggota Polri berafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wacana tersebut mengemuka dalam rangka memperkuat independensi dan netralitas institusi kepolisian di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.

Pembahasan itu berlangsung dalam rapat lanjutan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang saat ini masih berada pada tahap penyerapan aspirasi publik. Komisi III DPR menghadirkan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Mirza Nasution, untuk memberikan pandangan akademis terhadap sejumlah usulan perubahan.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrahman, menilai konsep netralitas Polri perlu dimaknai lebih luas dan tidak hanya dibatasi pada larangan terlibat dalam politik praktis. Menurut dia, independensi anggota Polri juga perlu mencakup kebebasan dari berbagai afiliasi organisasi di luar institusi kepolisian.

“Apakah etis anggota Polri atau pimpinan Polri mendeklarasikan diri sebagai anggota ormas tertentu?” kata Habiburrahman dalam rapat pembahasan RUU Polri.

Politikus Partai Gerindra itu mene-

gaskan bahwa Kapolri maupun seluruh anggota Polri harus menjadi milik seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang organisasi, kelompok, maupun golongan tertentu. Karena itu, ia meminta masukan dari para akademisi mengenai kemungkinan pengaturan yang lebih tegas terkait independensi personel kepolisian.

“Kapolri itu milik semua. Kapolrinya warga Muhammadiyah, Kapolrinya warga NU juga. Milik seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Gagasan tersebut mendapat respons positif dari Guru Besar UPI, Cecep Darmawan. Ia menilai usulan tersebut sebagai pemikiran yang visioner karena selama ini diskusi mengenai independensi anggota Polri dari organisasi kemasyarakatan belum banyak muncul dalam pembahasan kebijakan publik maupun akademik.

“Saya sepakat anggota Polri harus menjadi milik semua golongan. Namun pengaturannya tidak harus dimasukkan ke dalam undang-undang, bisa menjadi perhatian melalui regulasi internal kepolisian,” kata Cecep.

Secara historis, prinsip netralitas aparat penegak hukum telah menjadi bagian penting reformasi sektor keamanan di Indonesia sejak era Reformasi 1998. Salah satu tonggak utamanya adalah pemisahan Polri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 1999 yang bertujuan memperkuat profesionalisme dan independensi kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum serta pelayanan masyarakat.

Dalam konteks in-

ternasional, sejumlah negara demokrasi seperti Inggris, Kanada, dan Australia juga menerapkan standar ketat mengenai netralitas aparat kepolisian. Polisi di negara-negara tersebut dibatasi untuk terlibat dalam aktivitas politik maupun organisasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Saat ini, ketentuan mengenai keterlibatan anggota Polri dalam organisasi tertentu sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Regulasi tersebut melarang anggota Polri menjadi anggota atau pengurus organisasi yang dilarang pemerintah, menjadi anggota atau pengurus partai politik, serta terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Sebelumnya, Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 juga mengatur bahwa anggota Polri dilarang menjadi anggota organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat tanpa persetujuan pimpinan Polri. Namun, mereka masih diperbolehkan menjadi pembina atau penasihat organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Sementara itu, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Polri wajib bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Melalui revisi UU Polri yang tengah dibahas, DPR berharap prinsip independensi tersebut dapat diperkuat sehingga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin terjaga di masa mendatang.(*)

Pemkot Kendari Gandeng IDCA Perkuat Pembinaan Drum Corps Generasi Muda



Pemerintah Kota Kendari membuka peluang kolaborasi dengan Indonesia Drum Corps Association (IDCA) Kota Kendari

Laporan: Mashuri

KENDARI, BP-Pemerintah Kota Kendari membuka peluang kolaborasi dengan Indonesia Drum Corps Association (IDCA) Kota Kendari untuk memperkuat pembinaan generasi muda melalui kegiatan drum band, marching band, dan drum corps. Komitmen tersebut mengemusi dalam audiensi Pengurus IDCA Kota Kendari yang diterima Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan di ruang kerjanya, Jumat (5/6/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Wali Kota Kendari itu menjadi langkah awal membangun sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi olahraga masyarakat dalam mengembangkan potensi seni, kreativitas, disiplin, serta karakter generasi muda melalui aktivitas drum corps yang semakin berkembang di berbagai daerah di Indonesia.

Sekda Kota Kendari Amir Hasan menegaskan bahwa pemerintah daerah menyambut baik kehadiran organisasi yang memiliki fokus pada pembinaan olahraga dan seni masyarakat tersebut. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya ditopang oleh infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber

daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.

“Keberadaan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang olahraga dan seni memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah Kota Kendari membuka untuk menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki visi yang sama dalam membangun daerah,” ujar Amir Hasan.

Audiensi tersebut dipimpin Ketua Umum IDCA Kota Kendari Muh. Rizaldy Tongasa. Dalam kesempatan itu, ia memperkenalkan organisasi sekaligus menyampaikan berbagai program pengembangan drum band, marching band, dan drum corps yang diharapkan dapat memperoleh dukungan pemerintah daerah.

Rizaldy menjelaskan bahwa IDCA merupakan organisasi yang telah ditetapkan sebagai anggota penuh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Nasional berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KORMI Nasional Nomor 025/SK/KORMI-NAS/IV/2021. Status tersebut memperkuat posisi IDCA sebagai wadah resmi pembinaan dan pengembangan olah-

raga masyarakat di bidang drum corps.

“Kehadiran IDCA di Kota Kendari diharapkan menjadi wadah pembinaan dan pengembangan bakat generasi muda di bidang seni dan olahraga masyarakat,” kata Rizaldy dalam pertemuan tersebut.

Asisten II Setda Kota Kendari Nismawati yang turut mendampingi Sekda berharap organisasi tersebut mampu menjadi mitra pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan yang produktif, edukatif, dan berdampak positif bagi masyarakat.

“Kami berharap IDCA dapat melahirkan atlet maupun pegiat drum corps yang mampu mengharumkan nama Kota Kendari di tingkat regional maupun nasional,” ujar Nismawati.

Secara historis, perkembangan marching band dan drum corps di Indonesia mengalami kemajuan signifikan sejak dekade 1970-an melalui pembinaan di sekolah, perguruan tinggi, serta institusi militer. Kehadiran KORMI sebagai induk olahraga masyarakat semakin memperluas ruang pembinaan berbagai cabang olahraga rekreasi dan komunitas, termasuk drum corps yang kini berkembang di banyak daerah.

Di tingkat inter-

nasional, aktivitas drum corps modern berakar dari tradisi korps musik militer di Amerika Serikat dan Eropa pada awal abad ke-20. Saat ini, kompetisi bergengsi seperti Drum Corps International (DCI) di Amerika Serikat menjadi salah satu tolok ukur perkembangan seni pertunjukan marching dan drum corps dunia yang melibatkan ribuan peserta setiap tahunnya.

Sebagai Ketua KORMI Kota Kendari, Amir Hasan menilai pengembangan drum band dan marching band tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter, kepemimpinan, kerja sama tim, dan disiplin generasi muda. Nilai-nilai tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

Audiensi berlangsung dalam suasana akrab dan konstruktif. Pertemuan itu diharapkan menjadi fondasi awal kerja sama berkelanjutan antara Pemerintah Kota Kendari dan IDCA Kota Kendari dalam memperkuat ekosistem olahraga masyarakat sekaligus membuka peluang lahirnya talenta-talenta drum corps yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. (*)

Kendari Raih Predikat JDIH Terbaik Sultra, Kantongi Nilai AA Istimewa



Laporan: Lisna

KENDARI, BP-Pemerintah Kota Kendari menegaskan posisinya sebagai daerah dengan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum terbaik di Sulawesi Tenggara setelah meraih penghargaan nilai pelaporan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tertinggi tingkat provinsi dengan skor 92 dan predikat AA (Istimewa). Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Bimbingan Teknis JDIH se-Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Kamis (4/6/2026).

Selain penghargaan JDIH, Kota Kendari juga menerima sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk motif tenun khas daerah yang telah terdaftar sebagai kekayaan intelektual. Capaian tersebut menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap warisan budaya lokal sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik berbasis hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, mengatakan pengelolaan JDIH memiliki fungsi strategis dalam menjamin keterbukaan informasi hukum kepada masyarakat. Menurutnya, setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban mendokumentasikan dan menyebarluaskan produk hukum secara cepat, akurat, dan mudah diakses.

“Melalui regulasi yang telah ditetapkan, pemerintah daerah diwajibkan mendokumentasikan produk-produk hukum secara cepat dan akurat sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai produk hukum yang telah ditetapkan,” ujar

Topan.

Topan menjelaskan, secara umum perkembangan JDIH di Sulawesi Tenggara menunjukkan tren positif. Namun, masih terdapat sejumlah daerah yang perlu meningkatkan pengelolaan dan pembaruan situs JDIH agar layanan informasi hukum dapat berjalan optimal.

“Masih ada beberapa daerah yang websitenya belum berjalan optimal dan belum diperbarui. Mudah-mudahan melalui bimbingan teknis ini seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan segera mengimplementasikan hasilnya di daerah masing-masing,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang selama ini terbangun antara Pemerintah Kota Kendari dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Ia menilai kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap kolaborasi dan sinergisitas dengan Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara terus berlanjut. Jika terdapat hal-hal yang perlu didiskusikan terkait sistem, perizinan, penerbitan maupun aspek lainnya, kami berharap tetap memperoleh pendampingan dan dukungan,” ujar Siska.

Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara untuk terus memperkuat kerja sama dan berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan layanan publik berbasis hukum. “Kami di Kota Kendari sangat terbuka terhadap berbagai bentuk kolaborasi dan

sinergisitas demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan yang mengangkat tema “Transformasi Digital JDIH Menuju Layanan Informasi Hukum yang Terbuka, Terintegrasi dan Responsif” itu diikuti sekitar 70 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara secara hybrid, baik luring maupun daring. Forum tersebut menjadi wadah penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi tuntutan digitalisasi layanan hukum.

Secara historis, JDIH nasional dibentuk untuk mewujudkan sistem dokumentasi hukum yang terpadu sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi pemerintah. Dalam perkembangannya, digitalisasi JDIH menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses informasi publik. Di tingkat internasional, penguatan sistem informasi hukum digital juga telah menjadi praktik umum di berbagai negara maju sebagai instrumen mendukung prinsip open government dan good governance.

Prestasi yang diraih Kota Kendari menunjukkan bahwa transformasi digital di bidang hukum tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penghargaan tersebut sekaligus menjadi indikator keberhasilan daerah dalam mengintegrasikan teknologi informasi dengan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik. (*)

Umi Noranah Kukuhkan Ketua TP-PKK Mawasangka Tengah Periode 2026-2031 Perkuat Program Keluarga Sejahtera



Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Buton Tengah, Umi Noranah Azhari, S.Pd, mengukuhkan Ketua TP-PKK Kecamatan Mawasangka Tengah masa bakti 2026-2031

Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Buton Tengah, Umi Noranah Azhari, S.Pd, mengukuhkan Ketua TP-PKK Kecamatan Mawasangka Tengah masa bakti 2026-2031 di Gedung Kesenian Kantor Kecamatan Mawasangka Tengah, Kelurahan Lakorua, Jumat (5/6/2026). Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat peran PKK dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Umi Noranah menegaskan bahwa keberadaan PKK memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

"Jabatan yang di-

emban merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui kerja nyata demi kemajuan keluarga dan masyarakat. Saya berharap Ketua TP-PKK yang baru dapat menjalankan tugas dengan baik serta menjadi motor penggerak berbagai program pemberdayaan masyarakat," kata Umi Noranah.

Ia menambahkan, tantangan pembangunan saat ini menuntut kader PKK untuk terus beradaptasi dan menghadirkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari penguatan ekonomi keluarga hingga peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan.

"Marilah kita bekerja bersama, bergerak bersama, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Jadikan PKK sebagai organisasi yang aktif, inovatif, responsif, serta tetap menjunjung tinggi semangat gotong royong dan pengabdian," ujarnya.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Staf Ahli TP-PKK Kabupaten Buton Tengah Kartini Adam Basan, jajaran pengurus TP-PKK Kabupaten Buton Tengah, Camat Mawasangka Tengah beserta perangkat kecamatan,

unsur Forkopimda kecamatan, para lurah dan kepala desa se-Kecamatan Mawasangka Tengah, serta pengurus TP-PKK tingkat kecamatan dan desa.

Umi Noranah menekankan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara TP-PKK dengan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat. Menurut dia, koordinasi yang baik hingga tingkat dasawisma menjadi faktor penting dalam memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Koordinasi yang kuat hingga tingkat dasawisma merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan program-program PKK di tengah masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh kader PKK untuk mengambil peran aktif dalam mendukung percepatan penurunan stunting, penguatan ketahanan keluarga, peningkatan ekonomi rumah tangga, serta pembinaan karakter generasi muda yang menjadi perhatian pemerintah saat ini.

Secara historis, Gerakan PKK telah menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia sejak berkembang secara nasional pada

awal dekade 1970-an. Melalui implementasi 10 Program Pokok PKK, organisasi ini berperan dalam mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga di berbagai daerah, termasuk mendukung program kesehatan ibu dan anak, ketahanan pangan, pendidikan keluarga, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks global, pemberdayaan perempuan dan keluarga juga menjadi bagian penting dari agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan tersebut menekankan pentingnya kesetaraan gender, penghapusan kemiskinan, peningkatan kesehatan, serta penguatan institusi sosial berbasis keluarga sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui kepengurusan baru periode 2026-2031, TP-PKK Kecamatan Mawasangka Tengah diharapkan mampu memperkuat implementasi program-program pemberdayaan masyarakat sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten Buton Tengah yang sejahtera, religius, berbudaya, dan berdaya saing. (*)

Sekda Buton Hadiri Money Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Regional Sulawesi, Bahasan Utama Money Kemendagri di Kendari



Laporan:La Harman

SULTRA, BP- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka percepatan pencapaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) wilayah Sulawesi di Sahid Azizah Syariah Hotel & Convention Kendari, Jumat (29/5/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan mendorong optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga non-ASN, pekerja rentan, serta pekerja jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah Kabupaten Buton turut ambil bagian dalam forum tersebut. Bupati Buton diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, La Ode Syamsuddin, S.Pd., M.Si., yang hadir bersama sejumlah pejabat terkait.

Rombongan Pemkab Buton yang mendampingi Sekda an-

tara lain Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton Asrudin, S.Sos., M.Si., Kepala Bappeda Buton Manafu, S.Sos., M.Si., Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah LM Hidayat, S.Sos., serta Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Buton Merye Alexander Donggi Hanas, S.P.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah, termasuk capaian Universal Coverage Jamsostek yang telah diraih oleh masing-masing pemerintah daerah.

Selain itu, dibahas pula berbagai strategi percepatan perluasan perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui dukungan pendanaan dari APBD, sehingga semakin banyak pekerja yang mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Forum ini juga menjadi sarana koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperkuat sinergi pelaksanaan program perlindungan sosial ketenagakerjaan di wilayah Sulawesi.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan komitmen dalam mengalokasikan anggaran untuk perlindungan pekerja, khususnya kelompok rentan dan tenaga kerja non-ASN.

Rapat koordinasi itu dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlan-syah, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, serta para kepala daerah se-Sulawesi.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan guna mewujudkan kesejahteraan pekerja dan memperkuat sistem perlindungan sosial di daerah. (*)

BPOM Temukan 22 Obat Herbal Berbahaya Mengandung Bahan Kimia Obat Periode Maret 2026



Peliput: Andina L

JAKARTA, BP-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 22 merek Obat Bahan Alam (OBA) yang beredar di Indonesia mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) berdasarkan hasil pengawasan periode Maret 2026. Temuan tersebut memicu peringatan keras dari regulator karena produk yang seharusnya berbahan alami itu terbukti mengandung zat kimia yang berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan temuan tersebut menunjukkan masih adanya pelaku usaha yang sengaja mencampurkan obat kimia ke dalam produk herbal untuk menghasilkan efek instan. Dari 22 merek yang ditemukan, sebanyak 10 produk memiliki Nomor Izin Edar (NIE), sedangkan 12 produk lainnya tidak memiliki izin edar atau mencantumkan nomor izin edar fiktif.

“Produk-produk ilegal ini diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau menggunakan identitas produsen fiktif untuk mengelabui konsumen. Ketiadaan izin edar ini

berarti produk tersebut tidak pernah melalui evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu oleh BPOM,” kata Taruna dalam keterangan resminya di Jakarta.

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, 13 merek merupakan produk peningkatan stamina pria yang mengandung sildenafil, tadalafil, nortadalafil, parasetamol, dan metil testosteron. Sementara enam merek produk pegal linu ditemukan mengandung deksametason, natrium diklofenak, asam mefenamat, prednisolon, kafein, dan parasetamol. Adapun satu produk penggemuk badan mengandung siproheptadin serta dua produk pereda gatal mengandung klorfeniramin maleat, mikonazol, kafein, dan parasetamol.

Menurut BPOM, keberadaan BKO dalam produk herbal sangat berbahaya karena kadar zat yang ditambahkan tidak diketahui secara pasti. Kondisi itu dapat menyebabkan konsumen menerima dosis yang tidak sesuai dan berisiko mengalami efek samping berat tanpa pengawasan tenaga kesehatan.

“OBA yang mengandung sildenafil, tadalafil, dan nortadalafil berisiko menyebabkan gangguan jantung, stroke, hingga kematian mendadak

apabila digunakan tanpa pengawasan medis,” ujar Taruna. Ia menambahkan penggunaan deksametason, prednisolon, natrium diklofenak, dan asam mefenamat secara tidak terkendali juga dapat memicu kerusakan ginjal, perdarahan lambung, hingga gangguan hormon yang menyebabkan efek moon face.

Selain pengawasan di dalam negeri, BPOM juga menerima informasi dari otoritas luar negeri melalui Post-Marketing Alert System (PMAS) mengenai dua produk suplemen kesehatan yang mengandung BKO dan beredar di Thailand. Produk tersebut merupakan suplemen stamina pria yang mengandung sildenafil dan tadalafil serta produk pelangsing yang mengandung furosemid. Hasil penelusuran BPOM menunjukkan kedua produk itu belum ditemukan beredar di Indonesia, namun potensi masuknya produk secara ilegal tetap menjadi perhatian.

Kasus pencampuran bahan kimia obat ke dalam produk herbal bukan kali pertama terjadi. Dalam lebih dari satu dekade terakhir, BPOM berulang kali menemukan produk jamu dan obat tradisional yang dicampur steroid, an-

algesik, hingga obat kuat. Temuan serupa juga terjadi di berbagai negara. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) beberapa kali mengingatkan bahwa produk herbal yang dicampur bahan farmasi tersembunyi menjadi salah satu ancaman terbesar dalam perdagangan obat tradisional global karena sulit dideteksi konsumen.

Secara internasional, sejumlah negara di Asia, Eropa, dan Amerika Utara juga pernah menarik produk herbal dari pasaran setelah ditemukan mengandung sildenafil, sibutramin, steroid, maupun obat antiinflamasi yang tidak dicantumkan dalam komposisi. Praktik tersebut umumnya dilakukan untuk memberikan efek cepat sehingga meningkatkan daya tarik produk di pasar.

Sebagai tindak lanjut atas temuan terbaru ini, BPOM melakukan penelusuran terhadap rantai produksi dan distribusi produk yang terindikasi mengandung BKO. Pemerintah menegaskan akan menindak tegas pelaku usaha yang terbukti memproduksi maupun mengedarkan produk tersebut secara ilegal.

“Pelaku yang sengaja menambahkan bahan kimia obat ke dalam produk obat bahan alam akan dikenai

BPJS Tegaskan Tarif JKN Belum Berubah Meski Biaya Kesehatan Naik

Peliput: Warman

JAKARTA, BP-BPJS Kesehatan memastikan besaran iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga saat ini masih tetap dan belum mengalami kenaikan. Penegasan tersebut disampaikan menyusul beredarnya berbagai informasi yang menyebut adanya “iuran terbaru BPJS”, sehingga memunculkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa tarif iuran yang berlaku saat ini masih mengacu pada Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan dan belum ada perubahan kebijakan terkait besaran iuran peserta JKN.

“Iuran JKN sampai saat ini masih tetap dan tidak ada perubahan. Masyarakat perlu berhati-hati terhadap informasi yang tidak utuh atau judul yang menyesatkan seolah-olah ada kenaikan iuran, padahal faktanya tidak demikian,” ujar Rizzky, Jumat (9/6/2026).

Menurut BPJS Kesehatan, peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBPU) atau peserta mandiri kelas I masih membayar iuran Rp150 ribu per orang per bulan, kelas II sebesar Rp100 ribu, dan kelas III sebesar Rp42 ribu per orang per bulan. Untuk peserta kelas III, pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp7 ribu sehingga nominal yang dibayarkan peserta hanya Rp35 ribu per bulan.

Penegasan tersebut muncul di tengah meningkatnya biaya pelayanan kesehatan

yang dipengaruhi inflasi sektor kesehatan, perkembangan teknologi medis, kenaikan harga obat-obatan, alat kesehatan, serta biaya operasional rumah sakit yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

Meski menghadapi tekanan biaya yang meningkat, BPJS Kesehatan menilai Program JKN tetap mampu memberikan perlindungan kesehatan yang luas bagi masyarakat. Berbagai penyakit berbiaya tinggi seperti gagal ginjal kronis, kanker, penyakit jantung, talasemia, hemofilia, hingga diabetes melitus dengan komplikasi tetap dapat dijamin melalui mekanisme gotong royong yang menjadi fondasi utama program tersebut.

“Di tengah biaya kesehatan yang terus meningkat, iuran JKN masih tetap sama selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan bahwa Program JKN dijaga agar tetap terjangkau sehingga masyarakat tetap memiliki perlindungan kesehatan,” kata Rizzky.

Ia mencontohkan biaya operasi pemasangan ring jantung yang dapat mencapai Rp150 juta untuk satu pasien. Jika seseorang hanya mengandalkan tabungan sebesar Rp35 ribu per bulan, dibutuhkan dana sebesar biaya operasi tersebut. Melalui sistem gotong royong JKN, biaya tersebut dapat ditanggung bersama oleh ribuan peserta lain yang dalam kondisi sehat.

“Operasi pemasangan ring jantung misalnya. Satu pasien JKN bisa mencapai Rp150 juta. Namun dengan adanya Program JKN, biaya opera-

si tersebut bisa dibayarkan dari iuran peserta lain yang sehat,” ujarnya.

Secara historis, Program JKN yang diluncurkan pemerintah pada 1 Januari 2014 merupakan salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Program ini lahir sebagai implementasi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan terus berkembang menjadi instrumen utama perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam berbagai laporan internasional, Indonesia kerap disejajarkan dengan sejumlah negara yang menerapkan cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC), seperti Inggris melalui National Health Service (NHS), Kanada, Jepang, dan Korea Selatan.

Di tingkat nasional, JKN juga menjadi tonggak penting reformasi sektor kesehatan karena menyatukan berbagai skema asuransi kesehatan yang sebelumnya terpisah. Kehadiran program ini dinilai membantu jutaan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan tanpa harus menanggung biaya pengobatan yang berpotensi menguras kondisi ekonomi keluarga.

Karena itu, BPJS Kesehatan mengimbau peserta untuk menjaga status kepesertaan tetap aktif dengan membayar iuran secara rutin serta menerapkan pola hidup sehat. “Gotong royong adalah fondasi utama Program JKN. Karena itu, penting bagi seluruh peserta untuk menjaga kepesertaan tetap aktif sekaligus menjaga kesehatan agar manfaat program ini dapat terus dirasakan bersama,” tutup Rizzky.(*)

miliar.

BPOM mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur produk herbal yang menjanjikan hasil instan atau efek sangat cepat. “Laporkan kepada BPOM atau pihak berwenang jika menemukan produk mencurigakan di pasaran demi keselamatan

bersama,” ujar Taruna. Masyarakat juga diminta menerapkan prinsip Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) serta memverifikasi legalitas produk melalui aplikasi BPOM Mobile atau situs resmi BPOM sebelum membeli dan menggunakannya.(*)

PT FAREN GRAFIKA Harian Pagi Baubau Post KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi	Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun,Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman	Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin	Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana	Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks
Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara				

Mahfud Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi Program Makan Bergizi Gratis



Mahfud menilai selama kepemimpinan Dadan, langkah BGN kerap menimbulkan polemik dengan pengadaan hal-hal yang tak relevan terkait MBG.

Laporan: Amran

YOGYAKARTA, BP- Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mendukung langkah Kejaksaan Agung yang menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Mahfud, pengungkapan perkara tersebut menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola program strategis nasional yang menyangkut kebutuhan gizi masyarakat.

Kasus ini menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Ditemui di Le Gareca Space, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (6/6), Mahfud menyambut positif proses hukum yang tengah berjalan. “Ya bagus,” kata Mahfud singkat saat dimintai tanggapan mengenai penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung.

Direktur Peny-

idikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarif Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa program MBG semestinya dikelola oleh yayasan yang memiliki afiliasi dengan sekolah penerima manfaat. Namun dalam praktiknya, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut ditunjuk karena memiliki keterkaitan dengan petinggi BGN.

Menurut Syarif, yayasan-yayasan tersebut bahkan tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra SPPG. Meski demikian, mereka memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari. “Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP,” ujarnya.

Mahfud menilai persoalan tata kelola di BGN sebenarnya sudah terlihat sejak awal pelaksanaan program. Berbagai kritik dan tuntutan evaluasi muncul pada bulan-bulan pertama implementasi MBG, namun menurutnya tidak direspons dengan perbaikan yang memadai.

“Sebenarnya pada bulan-bulan pertama itu sudah kelihatan ugul-ugalan,” kata Mahfud. Ia menilai

terdapat kekeliruan dalam memahami konsep makan bergizi gratis sebagai kebijakan negara dan penerapannya dalam praktik pengelolaan program.

Selain itu, Mahfud menyoroti sejumlah pengadaan yang sempat memicu polemik publik, seperti pembelian sepeda motor listrik dan kaos kaki yang dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan utama program pemenuhan gizi masyarakat. Ia juga menilai mantan pimpinan BGN kurang memahami tata kelola keuangan negara dan birokrasi pemerintahan.

Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya merupakan kebijakan yang baik. “Programnya bagus, tetapi pelaksanaannya harus dikelola secara profesional dan sesuai aturan,” ujarnya, seraya meyakini fakta-fakta lain akan terungkap dalam proses persidangan.

Secara historis, Indonesia telah menghadapi kasus korupsi yang berkaitan dengan program pelayanan publik dan bantuan sosial. Pengungkapan kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 pada 2020 menjadi salah satu contoh bagaimana lemahnya pengawasan dapat membuka ruang penyalah-

gunaan anggaran negara. Pengalaman tersebut mendorong penguatan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Di tingkat internasional, sejumlah negara juga menghadapi tantangan serupa dalam pelaksanaan program makan sekolah dan bantuan pangan. Organisasi internasional seperti Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) serta Program Pangan Dunia (WFP) berulang kali menekankan pentingnya transparansi, pengawasan, dan tata kelola yang baik untuk memastikan anggaran pangan dan gizi benar-benar sampai kepada penerima manfaat.

Pengusutan kasus dugaan korupsi MBG oleh Kejaksaan Agung kini menjadi perhatian publik karena menyangkut kredibilitas salah satu program sosial terbesar pemerintah. Proses hukum yang berjalan diharapkan tidak hanya mengungkap pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga menjadi dasar pembenahan sistem pengelolaan program gizi nasional agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. (*)

MAKI Soroti Dugaan Korupsi MBG, Modus Mark Up dan Tender Diatur



Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut modus korupsi tata kelola program MBG yang dilakukan eks Kepala BGN Dadan Hindayana cs amatiran.

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap program strategis pemerintah. Penilaian itu disampaikan menyusul penetapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan pejabat BGN lainnya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan program MBG.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarif Sulaeman Nahdi, menjelaskan penyidik menemukan indikasi penyimpangan dalam proses penunjukan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta dugaan penggelembungan harga dalam sejumlah pengadaan barang. Sejumlah yayasan yang ditunjuk disebut memiliki afiliasi dengan petinggi BGN meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana.

Dalam perkara tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka. Penyidik menduga terjadi mark up harga yang mengakibatkan kerugian negara dan tidak mendukung operasional utama program MBG.

Pengadaan yang dipersoalkan antara lain 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit

televisi berukuran 75 inci. Barang-barang tersebut dinilai tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan operasional penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyebut pola dugaan korupsi yang ditemukan tergolong sederhana dan kerap muncul dalam kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Hanya cara memainkan harga fiktif, mengatur tender, dan mengurangi spesifikasi,” kata Boyamin, Sabtu (6/6).

Menurut Boyamin, dugaan pengadaan barang yang tidak relevan dengan tujuan program menunjukkan adanya kecenderungan memanfaatkan proyek pemerintah untuk memperoleh keuntungan dari proses tender dan pemborongan. Ia juga menyoroti kualitas makanan yang diduga tidak sesuai standar hingga memicu kasus keracunan di sejumlah daerah.

“Itu nampak hanya mengejar tender dan pengadaan pemborongan sehingga mendapat komisi. Ini yang memprihatinkan,” ujar Boyamin.

Ia menilai kasus tersebut tidak lepas dari lemahnya sistem pengawasan internal. Menurut dia, keberadaan mekanisme pengendalian yang tidak berjalan efektif membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program.

“Yang mengawasi siapa? Praktiknya nyatanya tidak ada, sehingga memudahkan terjadinya korupsi,” katanya.

Boyamin juga menilai sebagian pihak kemungkinan merasa aman karena memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan. Namun, ia meyakini Presiden

Prabowo Subianto tidak akan mentoleransi penyimpangan dalam program unggulan pemerintah tersebut. “Pak Prabowo juga marah dalam kasus ini karena merasa dikhianati dan nama baik programnya dicemarkan,” ujarnya.

Secara historis, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu modus yang paling sering ditangani aparat penegak hukum di Indonesia sejak era reformasi. Data berbagai penanganan perkara oleh aparat penegak hukum menunjukkan praktik mark up, pengaturan pemenang tender, dan pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan menjadi pola berulang dalam kasus korupsi sektor publik. Di tingkat internasional, pola serupa juga banyak ditemukan dalam proyek bantuan sosial dan program kesejahteraan masyarakat di sejumlah negara berkembang, sehingga lembaga seperti World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development terus mendorong transparansi pengadaan serta pengawasan berbasis teknologi untuk meminimalkan risiko penyimpangan.

MAKI berharap pengungkapan perkara ini menjadi momentum perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis dan program strategis nasional lainnya. Selain memperkuat transparansi dan kepastian regulasi, organisasi tersebut juga mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset guna meningkatkan efek jera terhadap pelaku korupsi serta memulihkan kerugian negara secara lebih optimal. (*)

Wakil Wali Kota Wa Ode Hamsina Buka TC MTQ, Baubau Bidik Prestasi di Konawe 2026



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau mulai mematangkan persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 dengan menggelar pemusatan latihan (Training Centre/TC) bagi seluruh anggota kafilah. Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Baubau, Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc, di Villa Nirwana, Jumat (5/6/2026).

Pemusatan latihan ini menjadi tahapan penting menjelang pelaksanaan MTQ Provinsi Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Konawe pada 21-29 Juni 2026. Melalui program tersebut, para peserta akan mendapatkan pembinaan intensif guna meningkatkan kualitas tilawah, hafalan, pemahaman, serta kesiapan mental saat bertanding.

Wakil Wali Kota Baubau menegaskan bahwa target yang ingin dicapai tidak hanya berorientasi pada perolehan juara, tetapi juga membentuk generasi Qurani yang mampu memahami, mengamalkan, dan menyebarkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan bermas-

yarakat.

"Pelaksanaan Training Centre ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Ini merupakan langkah strategis dan ikhtiar nyata untuk membentuk mental, fisik, serta kualitas para kafilah sebelum bertanding di tingkat provinsi," kata Wa Ode Hamsinah Bolu.

Menurutnya, keberhasilan dalam MTQ tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membaca atau menghafal Al-Qur'an, tetapi juga kesiapan fisik dan mental peserta selama mengikuti kompetisi. Karena itu, seluruh peserta diminta memanfaatkan setiap sesi latihan sebagai sarana evaluasi dan peningkatan kemampuan.

"Jadikan setiap materi dan arahan dari pelatih sebagai bekal untuk terus berkembang. Fokus dan disiplin adalah kunci utama dalam meraih hasil terbaik," ujarnya.

Dalam arahnya, Wakil Wali Kota menyampaikan tiga pesan penting kepada peserta. Pertama, menjaga fokus dan disiplin selama mengikuti seluruh rangkaian pembinaan. Kedua, menjaga kesehatan fisik dan mental melalui pola hidup sehat serta istirahat yang cukup. Ketiga, meluruskan niat bahwa seluruh perjuangan

yang dilakukan merupakan bagian dari ibadah dan upaya memuliakan kalam Allah SWT.

"Niatkan seluruh proses ini sebagai ibadah. Dengan niat yang tulus, setiap usaha dan pengorbanan akan bernilai di sisi Allah SWT," tuturnya.

Selain memberikan motivasi kepada peserta, Wa Ode Hamsinah juga menyampaikan apresiasi kepada para pelatih, instruktur, dan ofisial yang bertanggung jawab membina para kafilah. Pemerintah Kota Baubau berharap seluruh tim pendamping dapat memberikan metode pelatihan terbaik agar peserta mampu tampil optimal di arena MTQ.

"Tunjukkan bahwa Kota Baubau adalah daerah yang kaya akan potensi qari, qariah, hafiz, dan hafizah terbaik yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional," tegasnya.

Adapun cabang yang mengikuti Training Centre tahun ini meliputi Tartil Al-Qur'an kategori anak-anak, remaja, dan dewasa; Qira'at Murattal remaja dan dewasa; Qira'at Mujawwad dewasa; Cabang Cermat Al-Qur'an (CCQ); Syahril Al-Qur'an; Hafalan Al-Qur'an kategori 1, 5, 10, 20, dan 30 juz; serta Tafsir Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia,

Arab, dan Inggris.

Secara historis, MTQ merupakan ajang syiar Islam yang telah berkembang menjadi agenda nasional sejak penyelenggaraan MTQ Nasional pertama di Makassar pada 1968. Sejak saat itu, kompetisi ini tidak hanya menjadi wadah pembinaan qari dan hafiz, tetapi juga instrumen penguatan budaya literasi Al-Qur'an di Indonesia. Hingga kini, MTQ telah melahirkan banyak duta Al-Qur'an yang mengharumkan nama Indonesia di berbagai ajang internasional.

Di tingkat global, kompetisi tilawah dan hafalan Al-Qur'an juga rutin digelar di sejumlah negara seperti Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Iran. Indonesia termasuk salah satu negara yang kerap menorehkan prestasi pada ajang-ajang tersebut melalui para qari, qariah, hafiz, dan hafizah hasil pembinaan berjenjang dari daerah hingga tingkat nasional.

Melalui pemusatan latihan yang telah dimulai ini, Pemerintah Kota Baubau berharap seluruh anggota kafilah mampu tampil maksimal di Konawe sekaligus mempertahankan tradisi pembinaan generasi Qurani yang menjadi bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia berbasis nilai-nilai keagamaan. (*)

Kerja Sama 10 Tahun, Pemkot Baubau Tinjau Aset Menara Mitratel Pemekot Baubau Bahas Perpanjangan Sewa Lahan dengan Mitratel



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau mulai membahas perpanjangan kerja sama pemanfaatan aset daerah berupa lahan yang digunakan untuk menara telekomunikasi milik PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel). Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si, di Aula Lantai II Kantor Wali Kota Baubau, Jumat (5/6/2026).

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Manager Asset Regional Office Sulawesi dan Maluku Utara PT Mitratel Nomor DMT.034/DV0/ROE-e1100000/III/2026 tertanggal 10 Maret 2026 tentang pemberitahuan sekilas penawaran harga perpanjangan sewa lahan yang merupakan aset Pemerintah Kota Baubau.

Dalam arahnya, La Ode Darus Salam menjelaskan bahwa pembahasan ini memiliki arti penting karena Mitratel merupakan

penyedia infrastruktur menara telekomunikasi yang digunakan berbagai operator seluler, termasuk Telkom sel, dalam mendukung kualitas layanan jaringan komunikasi di Kota Baubau.

Menurutnya, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk telah menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Baubau sejak tahun 2017. Kerja sama tersebut dijalankan dengan mekanisme perpanjangan kontrak setiap lima tahun.

Sekda mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang baru, pemerintah daerah perlu melakukan sejumlah tahapan evaluasi mengingat hubungan kerja sama kedua pihak telah berlangsung sekitar 10 tahun.

Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah pemeriksaan fisik lokasi menara telekomunikasi. Verifikasi lapangan tersebut bertujuan memastikan kondisi, kelayakan, serta keamanan struktur tiang

menara yang berdiri di atas aset milik pemerintah daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Baubau juga akan melakukan evaluasi terhadap nilai pemanfaatan aset. Langkah ini dilakukan untuk memastikan nilai sewa dan pemanfaatan aset daerah tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini.

La Ode Darus Salam menegaskan bahwa Pemerintah Kota Baubau pada prinsipnya mendukung investasi dan kerja sama yang memberikan manfaat bagi pembangunan daerah, selama seluruh prosedur dan persyaratan pemanfaatan aset dapat dipenuhi dengan baik.

Rapat koordinasi tersebut berlangsung lancar dan dihadiri oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Baubau serta perwakilan manajemen PT Mitratel. (*)